

DAFTAR PUSTAKA

Al qur'an Nul Karim dan Terjemahan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Undang – Undang dan Aturan terkait lainnya

_____, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

- Indonesia (a), *Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790)*
- Indonesia (b), *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357)*
- Indonesia (c), *Undang – Undang Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*

Peraturan

- Indonesia (d), *SID tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007*
- Indonesia (e), *Pasal 1 angka 24 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007*
- Indonesia (f), *Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/ 29 /Pbi/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek Dan/Atau Bilyet Giro Kosong*
- Indonesia (g), *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan*
- Indonesia (h), *Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005. Penilaian Kualitas Aktiva Bank umum.*

Surat Edaran

- Bank Indonesia. “*Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/13/DASP Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong*”

Buku

- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta , Sinar Grafika, 2002, Hal. 15
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta , Sinar Grafika, 2002, Hal. 21.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed.6, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2002) hlm.23
- GM.Verryn Stuart dalam Thomas Suyanto dkk, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm.1
- Dr. Santosa Sembiring, S.H., M.H., *Hukum Perbankan*,(Bandung: Mandar Maju,2012),hlm1
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, (Jakarta: Renika Cipta, 2009), hal. 196
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal 302

Jurnal

- Norden, L., & Weber, M. (2010). *Credit Line Usage, Checking Account Activity, and Default Risk of Bank Borrowers*. *Review of Financial Studies*, 23(10), 3665–3699. doi:10.1093/rfs/hhq061
- Baiden, J. E. (2011). *The 5 C's of Credit in the Lending Industry*. Available at SSRN 1872804.
- Lestari, H. (2012). Otoritas jasa keuangan: Sistem baru dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 557-567.

- Nasution, F. F. (2019). Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Kebijakan Hapus Buku dan Hapus Tagih pada Bank Pemerintah Daerah dan Bank Swasta (Studi di PT. Bank Sumut, Tbk dan PT. Bank Mega Syariah, Tbk).
- Cahyadi, A. (2014). Mengelola hutang dalam perspektif Islam. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 4(1)
- Sybrandus Johannes Fockema Andreae, Nikolaas Egbert Algra, H.R.W. Gokkel, *Rechtsgeleerd handwoordenboek. Indonesia & Dutch*, Terjemahan Kamus Istilah Hukum Belanda – Indonesia, (Bandung: Bina Cipta 1977). Hlm 40.
- Nasution, F. F. (2019). Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Kebijakan Hapus Buku dan Hapus Tagih pada Bank Pemerintah Daerah dan Bank Swasta (Studi di PT. Bank Sumut, Tbk dan PT. Bank Mega Syariah, Tbk)
- Bambang Murdadi, *Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan*, Value Added, Vol.8, No.2, Maret 2012 – Agustus 2012, hal. 31.
- Fransika Ari Indrawati, “*Mencermati Celah Independensi OJK dalam UU OJK*”, Artikel pada Buletin Hukum Perbankan dan Kebansentralan. Volume 10, Nomor 1, Januari-April 2012
- Harfin, A. (2018). Kesiapan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menampung Perpindahan Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia Menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada OJK Regional 9 Banjarmasin).
- Irawan, James Julianto, and MH SH. *Surat Berharga: Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*. Kencana, 2016.
- Riwiyanti, F. (2011). Perlindungan Hukum terhadap Penerima Bilyet giro Kosong berdasarkan SKBI No. 28/KEP/DIR/1995 tentang Bilyet Giro dan Peraturan No. 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penerbit Cek/Giro Bilyet Kosong.
- Bank Indonesia (2010) *Daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong*. Bank Indonesia

- Faishal, Irham, dan Budiharto Budiharto. "Akibat Hukum Penerbitan Bilyet Giro Kosong Dalam Kegiatan Perbankan". *Diponegoro Law Journal* 8.1 (2019): 443-456
- Novrianda, N. W. "Penggunaan Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran Pada Bank Nagari Cabang Pembantu Sijunjung". Disertasi Doktor Universitas Andalas, Sumatera Barat. 2017.
- WL, Anik Tyaswati. 2016. "Penggunaan Bilyet Giro Kosong Sebagai Alat Pembayaran dan Upaya Mengatasinya". *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 12.1.
- Tbk, PT Bank Danamon Indonesia. "PT Bank Danamon Indonesia Tbk-Laporan Tahunan 2012." (2013)
- Fatchur, R., & Siti, A. (2015). Analisis Pengaruh Kolektibilitas Kredit Dan Kemampuan Debitur Terhadap Kualitas Asset Produktif Pada KSU Mitra Usaha.
- Faishal, I., & Budiharto, B. (2019). Akibat Hukum Penerbitan Bilyet Giro Kosong Dalam Kegiatan Perbankan. *Diponegoro Law Journal*.

Jurnal Islam

- Abdullah, A. (2019). Pinjaman Kredit dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 40-52
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Istitut Bankir Indonesia, log.cit hal 10-11
- Wanprestasi yaitu kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu di antaranya tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan, melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan. Dikutip dari R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1970), hlm. 50

Muhammad, Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman, (Yogyakarta: Ekonisia,2006),hlm. 95

Wawancara

- Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Novian Gilang Wibowo dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Cabang Hayam Wuruk Jakarta Pusat, pada Rabu, 26 Maret 2020